



Virtualisasi Ruang Publik sebagai Bentuk Transformasi Ruang Deliberasi ke Media sosial

Abdullah^{1*}, Murni Siregar²

¹⁻²Universitas Paramadina, Indonesia

Email : abdullah@students.paramadina.ac.id¹, murni.siregar@students.paramadina.ac.id²

*Penulis Korespondensi : abdullah@students.paramadina.ac.id

Abstract. *The development of digital technology and social media has brought significant changes to the public sphere and the mechanisms of democratic deliberation. Social media now plays a crucial role as a platform for discussion, interaction, and political mobilization, potentially replacing or even revolutionizing traditional political forums. This study examines the phenomenon of the virtualization of the public sphere by reviewing theories on the transformation of deliberative spaces in the digital era, and assesses the extent to which social media can substitute conventional political forums. This research adopts a theoretical approach and literature analysis to explore the dimensions of engagement, participation, and the challenges faced by social media as a space for digital democratic deliberation. The findings indicate that social media represents a dynamic and promising arena for strengthening deliberative democracy, but it also encounters serious challenges such as polarization, misinformation, filter bubbles, information manipulation, digital divides, and the difficulty of reaching consensus and compromise in online spaces. This article also discusses the implications of these findings for political communication theory, political practices in the digital age, and the role of both government and civil society in managing these changes. It is hoped that this article will contribute to a better understanding of the role of social media in political communication and its implications for democracy in the digital era.*

Keywords: *Democratic Deliberation; Digital Transformation; Political Forum; Public Sphere; Social Media.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam ruang publik dan mekanisme deliberasi demokrasi. Media sosial kini berperan penting sebagai platform diskusi, interaksi, dan juga sebagai mobilisasi politik yang dapat menggantikan atau bahkan merevolusi forum politik tradisional. Penelitian ini mengkaji fenomena virtualisasi ruang publik dengan meninjau teori-teori transformasi ruang deliberasi dalam era digital, serta menilai sejauh mana media sosial dapat menggantikan forum politik konvensional. Kajian ini menggunakan pendekatan teoritik dan analisis literatur untuk memahami dimensi keterlibatan, partisipasi, serta tantangan yang dihadapi media sosial sebagai arena deliberasi demokrasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial merupakan ruang yang dinamis dan potensial dalam memperkuat demokrasi deliberatif, namun juga menghadapi tantangan serius terkait polarisasi, misinformasi, filter bubble, manipulasi informasi, kesenjangan digital bahkan sulitnya mencapai kesepakatan dan kompromi dalam ruang online. Dalam artikel ini juga akan membahas tentang implikasi temuan terhadap teori komunikasi politik, praktik politik di era digital dan peran pemerintah maupun masyarakat sipil dalam mengelola perubahan ini. Sehingga diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial dalam komunikasi politik dan implikasinya bagi demokrasi di era digital.

Kata Kunci: Deliberasi Demokratis; Forum Politik; Media Sosial; Ruang Publik; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Dalam Pendekatan dan kajian demokrasi, ruang publik telah menjadi konsep penting sebagai tempat dimana warga negara dapat berinteraksi, berdiskusi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun jika ditelaah secara mendalam perkembangan Teknologi digital, ruang publik telah mengalami transformasi yang signifikan. Media sosial telah menjadi platform baru untuk deliberasi dan partisipasi publik, memungkinkan warga negara untuk berinteraksi dan berbagi banyak informasi dengan lebih mudah dan dapat menjangkau secara luas.

Virtualisasi ruang publik telah membuka peluang baru untuk partisipasi publik dan deliberasi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru. Bagaimana ruang publik virtual ini dapat mempengaruhi proses deliberasi dan partisipasi publik? Bagaimana media sosial dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi digital telah memberikan reorientasi pada cara manusia berinteraksi, terutama terkait ruang publik dan proses demokrasi. Konsep ruang publik yang selama ini lekat dengan interaksi fisik mulai bergeser ke format digital, terutama media sosial yang memungkinkan ruang dialog terbuka dan mudah diakses. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform sejenisnya bukan hanya sebagai media komunikasi semata tetapi juga ruang berlangsungnya proses debat, opini publik, dan mobilisasi politik. Hal ini membawa implikasi besar bagi demokrasi deliberatif, terutama soal bagaimana ruang-ruang politik tradisional bertransformasi dan apakah mereka dapat digantikan oleh ruang virtual ini.

Seperti yang dijelaskan oleh Habermas (1962), ruang publik merupakan arena penting bagi pertukaran pendapat dan pembentukan opini bersama masyarakat, namun pertanyaannya adalah, apakah konsep ini dapat diadaptasi dalam konteks media sosial? Apakah media sosial mampu menjunjung prinsip deliberasi yang rasional dan inklusif seperti ruang publik tradisional? Sedangkan dalam penjelasan Dewey (1927), pentingnya komunikasi publik dalam proses demokrasi dikarenakan proses ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang demokratis. fenomena penggunaan media sosial di Indonesia dapat dilihat dari data dalam tabel berikut.



Gambar 1. Pertumbuhan Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia Tahun 2025.

Sumber: We Are Social & Kepios, 2025

Gambar ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, terdapat lebih dari 190 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, dengan Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai platform paling populer. Dari data ini juga menunjukkan rata-rata waktu penggunaan internet mencapai 8 jam 30 menit per hari. Dan hasil survey tersebut memperlihatkan Indonesia memiliki populasi

penggunaan media sosial dan internet yang sangat besar. Media sosial menjadi salah satu wadah untuk menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan, dan mengorganisir kegiatan sosial, bahkan melakukan kampanye digital. Menurut Kreiss dalam bukunya *Prototype Politics: Technology-Intensive Campaigning and the Data of Democracy*, kampanye politik digital melibatkan penggunaan data pemilih, personalisasi pesan, dan eksperimentasi yang cepat untuk memengaruhi perilaku pemilih. Ia menyoroti bagaimana teknologi digital memungkinkan kampanye untuk menjadi lebih terarah dan berbasis data, (Kreiss D, 2016). sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia memiliki relevansi yang signifikan dengan virtualisasi ruang publik sebagai bentuk transformasi ruang deliberasi ke media sosial. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat memanfaatkan potensi ruang publik virtual untuk meningkatkan partisipasi politik. Namun, untuk memaksimalkan manfaat ruang publik virtual dan meminimalisir risikonya, literasi digital sangat penting.

Merujuk pada fenomena tersebut, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama: 1). Apakah media sosial dapat menggantikan fungsi forum politik tradisional sebagai ruang deliberasi demokrasi?. 2). Bagaimana teori-teori ruang publik dan deliberasi bertransformasi di era digital?. 3). Apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial sebagai ruang publik digital bagaimana peran pemerintah dan lembaga masyarakat sipil dalam mengelola perubahan ini. 4). Bagaimana peran pemerintah dan lembaga masyarakat sipil dalam mengelola perubahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengkaji dan menganalisis konsep virtualisasi ruang publik dan teori transformasi ruang deliberasi dalam konteks digital. 2). Menilai peran media sosial sebagai ruang publik dan potensinya menggantikan forum politik. 3). Mengidentifikasi tantangan dan peluang media sosial dalam memperkuat demokrasi deliberatif di era digital.

Artikel ini relevan dengan perkembangan teknologi digital yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berdiskusi. Dengan semakin populernya media sosial, ruang publik virtual menjadi platform yang penting untuk deliberasi dan diskusi publik. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana ruang publik melalui media sosial dapat menjadi bentuk transformasi ruang deliberasi yang efektif.

Virtualisasi ruang publik memungkinkan transformasi ruang deliberasi ke media sosial yang membuat media sosial menjadi platform penting untuk diskusi dan debat publik dalam ruang publik virtual, dengan demikian virtualisasi ruang publik dan transformasi ruang deliberasi ke media sosial memiliki hubungan yang erat, dimana virtualisasi ruang publik memungkinkan transformasi ruang deliberasi ke media sosial, dan media sosial menjadi platform penting untuk diskusi dan debat publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Ruang Publik

Ruang publik merupakan konsep fundamental dalam teori demokrasi dan komunikasi politik. Menurut Jürgen Habermas (1962), ruang publik adalah arena di mana individu dan kelompok berkumpul untuk berdiskusi dan membentuk opini politik secara rasional dan terbuka. Habermas menekankan pentingnya komunikasi tanpa paksaan, kesetaraan partisipan, dan rasionalitas dalam proses deliberasi. Ruang publik tradisional biasanya berupa forum fisik seperti balai pertemuan dan organisasi masyarakat sipil di mana warganegara bisa bertukar ide dan menyuarakan kepentingan mereka.

Robert Dahl (1989) menjelaskan bahwa demokrasi yang ideal membutuhkan ruang di mana warga negara bisa berpartisipasi dan berdebat tentang kebijakan secara terbuka. Sementara itu, Nancy Fraser (1990) mengkritik sebagian konsep Habermas dengan menambahkan bahwa ruang publik tidak hanya perlu inklusif tetapi juga harus memperhatikan representasi berbagai kelompok sosial, khususnya mereka yang selama ini tersisih. Dalam konteks ini, Fraser menekankan pentingnya pluralitas dalam ruang publik, di mana suara-suara marginal harus didengar dan diakomodasi dalam proses deliberasi. Hal ini menjadi semakin relevan dalam era digital, di mana media sosial dapat berfungsi sebagai platform bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk menyuarakan pendapat mereka.

Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital

Perkembangan internet dan media sosial menimbulkan konsep ruang publik digital (*digital public sphere*) yang meninjau bagaimana interaksi politik dan sosial terjadi tidak lagi terbatas oleh ruang fisik. Media sosial, dengan kemampuannya menyediakan platform interaktif, membuka kesempatan partisipasi lebih luas dan cepat (Papacharissi, 2010). Misalnya, Twitter dan Facebook bisa menjadi forum di mana isu-isu politik dibahas secara terbuka, kampanye politik dimobilisasi, sampai aktivitas aksi sosial dan protes diorganisasikan.

Namun, menurut Sunstein (2001), dinamika media sosial juga memperlihatkan “echo chamber” yaitu kecenderungan orang berkumpul dengan kelompok yang sepemikiran, sehingga polarisasi opini dapat muncul. Selain itu, media sosial menghadirkan risiko penyebaran misinformasi dan hoaks yang bisa merusak kualitas debat demokratis (Allcott & Gentzkow, 2017). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat atau justru melemahkan deliberasi demokrasi.

Teori Transformasi Ruang Deliberasi

Perubahan ruang deliberasi dari fisik ke digital menjadi kajian penting dalam studi komunikasi dan politik kontemporer. Theocharis et al. (2015) menegaskan bahwa digitalisasi mengubah cara warga berpartisipasi dalam politik dan komunikasi publik. *Digital deliberation* menuntut adaptasi norma dan etika komunikasi baru yang mengakomodasi interaksi cepat dan multivokal di media sosial.

Baym (2010) menekankan bahwa ruang digital sebagai arena deliberasi harus dipahami sebagai ruang yang berbeda dengan kondisi fisik; di sini, interaksi acap kali bersifat asinkron dan multi-arah. Selaras dengan itu, Wright (2018) menyatakan bahwa media sosial memperluas ruang publik tradisional sekaligus menghadirkan dilema baru yang berhubungan dengan kendali algoritmik dan keterbukaan platform. Dalam hal ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana platform-platform ini mengatur interaksi dan mempengaruhi kualitas deliberasi.

Teori komunikasi politik yang dikemukakan oleh MC Nair (2003) menekankan pentingnya media dalam membentuk opini publik dan memfasilitasi diskursus politik. Nair berargumen bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai arena di mana berbagai kepentingan dan pandangan bertemu. Dalam konteks media sosial, teori ini relevan karena platform-platform ini memungkinkan interaksi langsung antara pengguna, menciptakan ruang bagi dialog dan debat yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dalam forum politik tradisional.

Sementara itu, Perloff (2010) dalam teorinya tentang efek media pada opini publik menekankan bahwa media sosial dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap isu-isu politik. Perloff menjelaskan bahwa media sosial tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk cara orang berpikir dan berinteraksi dengan informasi tersebut. Dalam konteks ini, media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat atau meredakan polarisasi politik, tergantung pada bagaimana informasi disajikan dan diterima oleh pengguna.

Teori Ruang Publik Virtual

Teori ruang publik virtual oleh Pierre Levy (1995) Levy berpendapat bahwa ruang publik virtual adalah ruang yang terbentuk oleh teknologi digital dan memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara bebas dan terbuka. Ruang publik virtual ini dapat memungkinkan partisipasi publik dan deliberasi yang lebih luas dan inklusif. Levy berpendapat bahwa ruang publik virtual memiliki karakteristik yang interaktivitas, desentralisasi dan keterbukaan, sehingga dapat memperkuat demokrasi dan mempromosikan kebebasan dalam berbicara atau kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Dalam bukunya Pierre Levy yang berjudul *Cyber culture* (1995) memang tidak secara spesifik dan tidak secara

gambang menyatakan bahwa media sosial menggantikan forum politik. Namun, teorinya tentang ruang publik virtual dan interaktivitas dapat membangun memahami media sosial mempengaruhi interaksi sosial politik. Levy menekankan bahwa ruang publik virtual memungkinkan orang berinteraksi dan berkomunikasi secara global, sehingga menciptakan platform baru untuk berdiskusi dan debat. Namun Levy juga menyadari bahwa ruang publik virtual memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri. Konsep utama teori pierre levy sendiri adalah Digitalitas, Interaktivitas, dan konektivitas. Teori ini memiliki dampak signifikan pada pemahaman kita tentang interaksi sosial dan komunikasi dalam era digital sekaligus membantu kita memahami bagaimana teknologi digital membentuk ruang publik virtual dan bagaimana orang berinteraksi dalam ruang tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis konstruktivis kritis terhadap berbagai sumber teori dan empiris terkait fenomena media sosial sebagai ruang publik digital dan forum politik. Fokusnya adalah pengumpulan dan kajian pustaka yang relevan dari jurnal ilmiah, buku, serta laporan riset politik dan media. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas dari fenomena yang sedang diteliti.

Sumber Data

Sumber yang dianalisis meliputi karya seminal Habermas (1962), teori ruang publik kontemporer, studi kasus atas aktivisme digital, serta analisis fenomena terkait media sosial yang dipublikasikan di jurnal seperti *New Media & Society*, *Journal of Communication*, dan berbagai penelitian lembaga riset politik serta teknologi informasi sampai tahun 2023. Data yang dikumpulkan mencakup artikel, buku, dan laporan yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran media sosial dalam deliberasi demokrasi. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap studi-studi sebelumnya yang telah mengkaji dampak media sosial terhadap partisipasi politik dan kualitas deliberasi, serta bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mengintegrasikan kerangka teoretis yang dibahas sebelumnya dengan temuan-temuan dari kajian empiris untuk mengevaluasi kapasitas media sosial dalam memenuhi ideal forum politik formal di Indonesia.

Peluang Media Sosial dalam Memfasilitasi Deliberasi dan Partisipasi

Media sosial memiliki beberapa karakteristik inherent yang berpotensi memperkaya kehidupan politik dan bahkan mendekatkannya pada cita-cita demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif.

Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas Partisipasi

Salah satu keunggulan terbesar media sosial adalah kemampuannya untuk menurunkan hambatan partisipasi politik. Ini sangat sejalan dengan visi Robert Dahl tentang pentingnya hak partisipasi yang luas dalam poliarki. Di Indonesia, di mana partisipasi politik tradisional sering kali terbatas pada elit atau lokasi tertentu, platform digital memungkinkan individu dari berbagai latar belakang geografis, sosial, dan ekonomi untuk terlibat dalam diskusi politik. Misalnya, selama pandemi COVID-19, forum-forum diskusi daring menjadi satu-satunya cara bagi warga untuk berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan publik.

Bagi kelompok-kelompok yang secara tradisional terpinggirkan, media sosial telah menjadi sarana vital untuk menyuarakan perspektif mereka dan membangun jaringan dukungan, merefleksikan konsep Nancy Fraser tentang kontra-publik subaltern. Gerakan-gerakan sosial yang berawal dari ranah digital, seperti kampanye #Indonesiagelap, #tolakruuKPK atau advokasi lingkungan lokal, seringkali berhasil menarik perhatian pada isu-isu yang sebelumnya kurang terliput oleh media arus utama. Mereka menyediakan platform bagi suara-suara yang menantang narasi hegemoni, membuktikan potensi media sosial dalam memperluas cakupan partisipasi yang inklusif.

Efisiensi Mobilisasi dan Organisasi Politik

Kecepatan dan jangkauan media sosial menjadikannya alat yang sangat efektif untuk mobilisasi massa dan organisasi politik. Dalam hitungan detik, informasi dapat menyebar ke jutaan orang, memungkinkan koordinasi aksi protes, kampanye kesadaran, atau pengumpulan dukungan untuk petisi. Fenomena ini telah mengubah lanskap aktivisme di Indonesia; kita menyaksikan bagaimana gelombang demonstrasi mahasiswa atau aksi *silent protest* di media sosial dapat dengan cepat terbentuk dan menarik partisipasi luas. Ini merefleksikan aspek mediatisasi politik yang dijelaskan oleh Brian McNair, di mana media digital menjadi kanal utama bagi aktor politik untuk berkomunikasi dan menggerakkan massa dengan efisien. Karena media sosial menjadi lokomotif perubahan yang sangat cepat dalam cara masyarakat berinteraksi dengan politik, memungkinkan mobilisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Potensi Interaksi Langsung dan Akuntabilitas Baru

Media sosial memungkinkan interaksi langsung antara politisi, pejabat publik, dan warga negara, memangkas birokrasi dan hierarki komunikasi tradisional. Politisi dapat menggunakan platform ini untuk menyampaikan pesan secara langsung, menjawab pertanyaan, atau bahkan terlibat dalam debat terbatas dengan konstituen mereka. Potensi ini dapat menciptakan rasa kedekatan dan transparansi yang lebih besar, berpotensi meningkatkan akuntabilitas politisi karena setiap tindakan atau pernyataan mereka dapat segera direspons oleh publik. Misalnya, banyak pejabat publik di Indonesia kini memiliki akun media sosial yang aktif digunakan untuk berkomunikasi dengan rakyat. Meskipun demikian, interaksi ini seringkali masih didominasi oleh komunikasi satu arah atau superfisial, dan tantangan untuk menerjemahkan interaksi digital ke dalam mekanisme akuntabilitas formal yang mengikat masih besar dan memerlukan kebijakan formal untuk mengikat tanggapan di ruang digital ke ruang formal.

Tantangan Media Sosial terhadap Ideal Forum Politik Formal

Meskipun media sosial menawarkan peluang, ia juga menghadirkan serangkaian tantangan signifikan yang mengancam kemampuannya untuk berfungsi sebagai forum politik formal yang deliberatif dan inklusif. Tantangan-tantangan ini secara langsung mengikis ideal yang diusung oleh Habermas, Dahl, dan Fraser.

Polarisasi dan Fragmentasi Ruang Publik

Salah satu ancaman terbesar terhadap ideal ruang publik deliberatif Habermas di media sosial adalah fenomena polarisasi dan fragmentasi. Echo chambers dan filter bubbles, yang diperparah oleh algoritma platform yang memprioritaskan keterlibatan dan personalisasi konten (sesuai pandangan Richard Perloff tentang efek media), cenderung mengurung individu dalam gelembung informasi yang homogen. Pengguna lebih sering terpapar pada pandangan yang sudah mereka setuju, sementara perspektif yang berbeda jarang muncul atau bahkan difilter keluar. Di Indonesia, polarisasi ini sangat terlihat dalam perdebatan politik, agama, atau isu sosial, di mana kelompok-kelompok yang berbeda nyaris tidak berdialog, melainkan saling menyerang narasi. Akibatnya, alih-alih mempromosikan pertukaran argumen yang rasional dan pencarian konsensus, media sosial justru dapat memperdalam perpecahan, mengurangi empati terhadap pandangan lain, dan meningkatkan antagonisme antar kelompok. Hal ini secara fundamental merusak kemampuan untuk mencapai pemahaman bersama yang esensial bagi deliberasi formal.

Kualitas Deliberasi yang Menurun: Disinformasi, Emosi, dan Superficialitas

Karakteristik inheren media sosial—seperti batas karakter, kecepatan yang ekstrem, dan penekanan pada konten visual—seringkali menyebabkan kualitas deliberasi yang dangkal. Informasi yang kompleks seringkali disederhanakan menjadi meme atau tajuk berita yang sensasional, mengorbankan nuansa dan detail yang penting untuk diskusi yang terinformasi. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah maraknya disinformasi dan misinformasi, termasuk hoaks dan propaganda terorganisir. Dengan kecepatan penyebaran yang tinggi dan kurangnya mekanisme verifikasi yang efektif, informasi palsu dapat dengan cepat membentuk opini publik, mengikis kepercayaan terhadap fakta, dan memanipulasi diskursus politik (sesuai dengan kekhawatiran Perloff tentang persuasi yang tidak etis). Contohnya, saat Pemilu 2024 di Indonesia, disinformasi tentang calon presiden atau hasil pemilu menyebar sangat cepat, mengikis kepercayaan publik.

Selain itu, media sosial juga menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dan cyberbullying, yang menghambat lingkungan diskusi yang aman dan inklusif. Emosi seringkali mendominasi rasionalitas, mengubah debat menjadi ajang caci maki dan serangan personal, alih-alih pertukaran argumen yang konstruktif. Ini secara langsung berlawanan dengan cita-cita Habermas tentang "kekuatan argumen yang tidak memaksa" dan menghambat potensi inteligensi kolektif Lévy.

Isu Representasi dan Akuntabilitas Formal

Meskipun media sosial meningkatkan partisipasi (sesuai fokus Dahl), pertanyaan tentang representasi dan akuntabilitas formal tetap menjadi tantangan. Suara-suara yang dominan di media sosial mungkin tidak selalu mencerminkan populasi riil, menimbulkan pertanyaan tentang "siapa yang benar-benar berbicara" dan "siapa yang didengarkan." Kampanye viral atau tren topik di media sosial belum tentu memiliki legitimasi politik yang sama dengan proses perwakilan formal seperti pemilihan umum atau pengambilan keputusan di parlemen. Kurangnya mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk diskusi atau "keputusan" yang muncul dari media sosial menjadi penghalang utama bagi kemampuannya untuk berfungsi sebagai forum formal. Tanpa struktur formal untuk mengikat hasil diskusi digital dengan pembuatan kebijakan, media sosial cenderung tetap menjadi ruang "informal" yang berpengaruh, tetapi tidak mengikat.

"Kolonisasi Sistem" Digital dan Kontrol Platform

Ancaman "kolonisasi sistem" yang diidentifikasi oleh Habermas kini memiliki manifestasi baru di era digital. Platform media sosial itu sendiri adalah entitas komersial raksasa yang didorong oleh keuntungan, dan keputusan algoritmik mereka, kebijakan moderasi

konten, dan model bisnis berbasis iklan dapat secara signifikan memengaruhi dinamika diskursus politik. Kepentingan ekonomi para pemilik platform, tekanan dari pemerintah (misalnya, terkait permintaan penghapusan konten), atau bahkan kekuatan kelompok lobi dapat memanipulasi informasi, menyensor konten, atau memprioritaskan pandangan tertentu. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang otonomi dan independensi ruang publik digital dari kekuatan yang lebih besar, mengancam kapasitasnya untuk menjadi arena deliberasi yang bebas dan terbuka, dan membuat potensi inteligensi kolektif sulit terwujud.

Perspektif Integratif: Menuju Demokrasi Digital Media Sosial sebagai Forum Politik Formal

Melihat peluang dan tantangan ini secara holistik, menjadi jelas bahwa media sosial, dalam bentuknya saat ini, belum mampu secara penuh bertransformasi menjadi forum politik formal yang ideal seperti yang dibayangkan oleh teori deliberasi. Ia adalah pedang bermata dua: memberikan suara kepada banyak orang tetapi juga memperkuat perpecahan dan menyebarkan disinformasi.

Namun, bukan berarti media sosial tidak memiliki tempat dalam ekosistem demokrasi. Ia dapat menjadi komplement penting bagi forum politik formal dan bukan sebagai pengganti. Untuk mencapai demokrasi digital yang lebih deliberatif, diperlukan upaya terintegrasi:

Pertama, Regulasi Platform yang Bertanggung Jawab: Pemerintah dan badan pengatur perlu mengembangkan kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi disinformasi, ujaran kebencian, dan praktik manipulatif tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Ini harus melibatkan tekanan pada platform untuk lebih transparan tentang algoritma mereka dan praktik moderasi konten, sejalan dengan kebutuhan Habermas akan ruang publik yang bebas dominasi.

Kedua, Peningkatan Literasi Digital dan Media: Warga perlu dibekali dengan keterampilan untuk secara kritis mengevaluasi informasi, mengidentifikasi disinformasi, dan terlibat dalam diskusi online secara konstruktif. Pendidikan literasi digital harus menjadi prioritas nasional, mendukung kualitas partisipasi yang diharapkan Dahl dan meminimalisir dampak negatif persuasi Perloff.

Ketiga, Desain Platform yang Mendorong Deliberasi: Inovator dapat merancang fitur atau platform baru yang secara eksplisit mendorong pertukaran argumen yang terstruktur, verifikasi fakta, dan interaksi yang lebih mendalam, alih-alih hanya berfokus pada keterlibatan emosional. Potensi inteligensi kolektif (Lévy) dapat dimanfaatkan secara lebih baik jika ada struktur yang mendukungnya.

Keempat, Jembatan Antara Ruang Digital dan Formal: Mekanisme perlu dikembangkan untuk menjembatani diskusi yang terjadi di media sosial dengan proses pembuatan kebijakan formal. Ini bisa berupa forum *citizen assembly* yang mengintegrasikan masukan *online*, atau mekanisme konsultasi publik yang memanfaatkan data dari diskusi digital secara terstruktur, untuk meningkatkan akuntabilitas formal yang diimpikan oleh Robert Dahl

Transformasi media sosial harus diarahkan secara sadar menuju pembangunan forum politik yang lebih sehat, yang mampu menyeimbangkan partisipasi luas dengan kualitas deliberasi, dan menjembatani informalitas digital dengan akuntabilitas formal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis teoretis dan tinjauan literatur yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah agen transformatif yang tak terbantahkan dalam arena politik kontemporer, menyediakan peluang signifikan untuk meningkatkan partisipasi politik dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan (sejalan dengan visi Robert Dahl dan Nancy Fraser). Platform digital telah berhasil mendemokratisasi akses ke diskusi politik dan memfasilitasi mobilisasi massa yang cepat. Namun, kapasitas media sosial untuk menjadi forum politik formal yang deliberatif dan akuntabel sebagaimana diidealkan oleh Jürgen Habermas, masih menghadapi tantangan fundamental.

Karakteristik inheren komunikasi digital, seperti kecepatan penyebaran informasi, personalisasi algoritma, dan kerentanan terhadap disinformasi (seperti yang dianalisis oleh Brian McNair dan Richard Perloff), seringkali menghambat diskusi rasional dan substantif, memperparah polarisasi, dan mengurangi kapasitas ruang publik untuk mencapai konsensus. Meskipun konsep inteligensi kolektif dari Pierre Lévy menawarkan potensi kolaborasi digital, realitas seringkali menunjukkan bahwa potensi ini terdistorsi oleh kebisingan, kurangnya verifikasi informasi, dan dominasi narasi yang kuat. Pada akhirnya, meskipun media sosial telah memicu "revolusi" dalam cara politik berlangsung (ia belum mampu sepenuhnya bertransformasi menjadi forum politik formal yang ideal tanpa adanya intervensi sadar dan perbaikan signifikan pada struktur, regulasi, dan literasi penggunaannya. Media sosial lebih berfungsi sebagai ruang publik informal yang sangat berpengaruh, daripada sebagai arena deliberasi formal yang sah dan mengikat, menyisakan kesenjangan besar antara partisipasi digital dan akuntabilitas formal.

Rekomendasi 1). Penguatan Literasi Digital: Masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang literasi digital agar mampu mengenali informasi yang benar dan salah, serta memahami cara berinteraksi secara konstruktif di media sosial. Ini termasuk pelatihan untuk mengenali

disinformasi dan hoaks. 2). Regulasi Konten: Pemerintah dan platform media sosial harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dalam menangani penyebaran informasi palsu dan mempromosikan transparansi dalam algoritma yang digunakan untuk menyajikan konten. 3). Fasilitasi Dialog Lintas Pandangan: Upaya harus dilakukan untuk menciptakan ruang di media sosial yang mendorong dialog antara berbagai pandangan, termasuk inisiatif yang menghubungkan individu dari latar belakang yang berbeda untuk berdiskusi secara konstruktif. 4). Akses yang Merata: Memastikan akses yang lebih luas dan merata terhadap teknologi dan internet, terutama di daerah yang kurang terlayani, untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua suara dapat didengar dalam diskursus publik. 5). Pengembangan Platform yang Bertanggung Jawab: Platform media sosial perlu berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung deliberasi yang sehat, termasuk fitur yang mendorong diskusi yang lebih mendalam dan substansial, serta mengurangi konten yang bersifat provokatif dan emosional. 6). Kebijakan Perlindungan Data dan Privasi: Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, perlindungan data pribadi dan privasi pengguna harus menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Ini termasuk regulasi yang ketat terhadap penggunaan data oleh platform media sosial. 7). Promosi Keterlibatan Sipil: Pemerintah harus mendorong keterlibatan sipil melalui inisiatif yang memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, seperti konsultasi publik dan forum diskusi online. 8). Pengembangan Indikator Kualitas Deliberasi: Kebijakan harus mencakup pengembangan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas deliberasi di media sosial, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik dan ruang publik dengan cara yang signifikan. Meskipun menawarkan peluang untuk partisipasi yang lebih luas, tantangan yang dihadapi dalam hal kualitas deliberasi dan integrasi berbagai pandangan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan inklusif untuk memanfaatkan potensi media sosial sebagai ruang publik digital yang mendukung demokrasi deliberatif. Melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan penerapan kebijakan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk diskursus politik dan partisipasi masyarakat.

Akhirnya, tantangan yang dihadapi oleh media sosial dalam konteks deliberasi demokrasi memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Hanya dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, kita dapat mengatasi hambatan yang ada dan memanfaatkan media sosial sebagai alat yang efektif untuk memperkuat partisipasi politik dan kualitas diskursus publik.

DAFTAR REFERENSI

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211-236. <https://doi.org/10.1257/jep.20171112>
- Barberá, P., et al. (2015). Tweeting from left to right: Is online political communication more than an echo chamber? *Psychological Science*, 26(10), 1531-1542. <https://doi.org/10.1177/0956797615594620>
- Baym, N. K. (2010). *Personal connections in the digital age*. Polity Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. In M. Calhoun (Ed.), *Habermas and the public sphere* (pp. 109-142). MIT Press. <https://doi.org/10.2307/466240>
- Freelon, D., et al. (2018). Beyond the hashtags: #Ferguson, #BlackLivesMatter, and the online struggle for offline justice. *Social Science Computer Review*, 36(4), 523-541. <https://doi.org/10.1177/0894439316684550>
- Habermas, J. (1962). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's fourth wave?: Digital media and the Arab Spring*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199936953.001.0001>
- Lazer, D., et al. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094-1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lee, S. (2020). The Hong Kong protests and social media: Popular communication in a digital era. *Journal of Contemporary Asia*, 50(5), 727-739. <https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1771234>
- Levy, P. (1995). *Cyber Culture: Theory Virtual Public Space*.
- Loader, B. D., & Mercea, D. (2011). Networking democracy? Social media innovations and participatory politics. *Information, Communication & Society*, 14(6), 757-769. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2011.592648>
- Mansbridge, J., et al. (2012). A systemic approach to deliberative democracy. In J. Parkinson & J. Mansbridge (Eds.), *Deliberative systems: Deliberative democracy at the large scale* (pp. 1-26). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139178914.002>
- McNair, B. (2003). *Media and democracy*. Routledge.
- Papacharissi, Z. (2010). *A networked self: Identity, community, and culture on social network sites*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203876527>
- Perloff, R. M. (2010). Social media effects on young women's body image concerns: Theoretical perspectives and an agenda for research. *Sex Roles*, 65(3-4), 149-162. <https://doi.org/10.1007/s11199-011-9996-0>
- Sunstein, C. R. (2001). *Republic.com*. Princeton University Press.
- Theocharis, Y., et al. (2015). Using Twitter to mobilize protest action: Online mobilization patterns and offline protest participation. *Information, Communication & Society*, 18(2), 202-220. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1103300>

van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. Polity Press.

Wright, S. (2018). The politics of digital media: Theory and research. In D. Karpf (Ed.), *Cambridge handbook of the digital politics* (pp. 1-20). Cambridge University Press.